



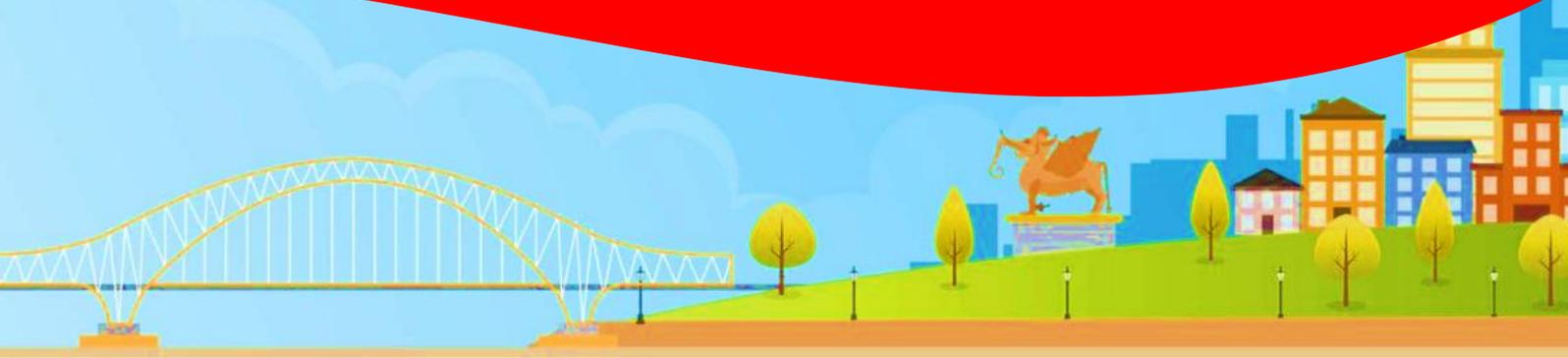
# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



# RENCANA KERJA

## TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR



**D**engan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, Beserta Kerabat, Sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Koperasidan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026. pada Tahun 2024 menjadi tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini.

Demikian dan dengan Izin dan Kehendak-Nya semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,  
Kabupaten Kutai Kartanegara



**Drs. H. TAJUDDIN**

NIP. 196404051986031036

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD	35
BAB IV. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V. PENUTUP	54

## DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2023 (TC.29)	07
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM (TC.30)	15
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (TC.31)	18
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 (TC.32)	34
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	37
4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas (TC.33)	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Rencana Kerja Tahunan yang paralel dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan kegiatan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk mencapai keterpaduan Rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengacu pada Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dan Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Disebutkan juga dalam Pasal 3 ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu dalam mengimplementasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Renja SKPD/OPD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD/OPD.

Renja OPD merupakan Dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);  
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2024, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara.

#### **2. Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja-PD, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renja-PD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja-PD.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dengan uraian program dan kegiatan yang merupakan panjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dipaparkan / dikemukakan rencana kerja pendanaan program dan kegiatan, indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;

**BAB V. PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026;

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan. Maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 (T.C 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2.17		<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>												
2.17	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	80,00	67,76	68,00	71,79	106%	70	70	87,50%			
	01	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	20	4	4	4	100%	2	10	50,00%	
	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%
	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	15	5	3	3	100%	3	11	73,33%
	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	10	2	2	2	100%	2	6	60,00%

01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%
01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%
01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya bagi Pegawai	318	0	0	0	0%	106	106	33,33%
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	0	30	30	100%	30	60	40,00%
01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	60	0	30	30	100%	0	30	50,00%
01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14,44%</b>	<b>34,02%</b>	<b>103,19%</b>	<b>303%</b>	<b>54,39%</b>	<b>54,39%</b>	<b>54,39%</b>
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor	48	0	12	12	100%	12	24	50,00%
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	225	45	45	45	100%	45	135	60,00%
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95	19	19	19	100%	19	57	60,00%
					Jumlah Porsi Makan dan Minum	4000	500	800	800	100%	800	2100	52,50%
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41	7	7	7	100%	9	23	56,10%
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1160	223	205	243	119%	250	716	61,72%
01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD	27	13	7	4	57%	5	22	81,48%

	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	8	2	2	2	100%	2	6	75,00%
	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60,00%
	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15,72%</b>	<b>34,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>289%</b>	<b>56,60%</b>	<b>56,60%</b>	<b>56,60%</b>
	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159	25	30	30	100%	35	90	56,60%
	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12,08%</b>	<b>24,16%</b>	<b>92,48%</b>	<b>383%</b>	<b>46,14%</b>	<b>46,14%</b>	<b>46,14%</b>
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	981	109	109	99	91%	218	426	43,43%
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60,00%
	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20,18%</b>	<b>40,38%</b>	<b>99,14%</b>	<b>245%</b>	<b>60,38%</b>	<b>60,38%</b>	<b>60,38%</b>
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	125	34	25	25	100%	25	84	67,20%
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140	20	30	20	67%	30	70	50,00%
	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5512	1112	1112	1112	100%	1100	3324	60,30%
<b>2.17</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>75,6%</b>	<b>38,52%</b>	<b>45,90%</b>	<b>46,15%</b>	<b>101%</b>	<b>53,30%</b>	<b>53,30%</b>	<b>70,54%</b>
<b>2.17</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	100%	<b>20,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>250%</b>	<b>60,00%</b>	<b>60,00%</b>	60,00%

2.17	02	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	50	10	10	10	100%	10	30	60,00%
<b>2.17</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT</b>	<b>27,24%</b>	14,98%	15,56%	15,34%	98,59%	21,40%	21,40%	78,57%
2.17	03	2	01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi</b>	<b>83,87%</b>	<b>38,91%</b>	<b>43,93%</b>	<b>7,66%</b>	17,44%	<b>75,88%</b>	75,88%	90,47%
2.17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Koperasi	200	40	125	34	27%	150	150	75,00%
						Jumlah Koperasi yang didampingi RAT	30	10	10	11	110%	20	20	66,67%
2.17	03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Koperasi	325	0	150	93	62%	275	275	84,62%
						Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi	25	0	5	0	0%	5	5	20,00%
<b>2.17</b>	<b>04</b>				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>18,52%</b>	0,00%	3,70%	3,70%	100,00%	7,41%	7,41%	40,01%
2.17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	180	0	53	53	100%	150	150	83,33%
2.17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian	90	0	53	53	100%	75	75	83,33%
2.17	04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan koperasi	90	0	0	0	0%	75	75	83,33%

2.17	05				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100%	65%	100%	140%	140%	100%	100%	100,00%
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	405	30	90	90	100%	90	210	51,85%
2.17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih	810	60	180	252	140%	180	492	60,74%
2.17	06				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	4,86%	n/a	0,97%	4,67%	481%	1,95%	1,95%	40,09%
						Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	4,86%	n/a	0,97%	2,14%	221%	1,95%	1,95%	40,09%
2.17	06	2	01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60	0	25	25	100%	40	40	66,67%
2.17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi	60	0	25	25	100%	40	40	66,67%
2.17	07				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	9,77%	0,00%	1,18%	1,18%	100%	1,99%	3,17%	32,45%
2.17	07	2	01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah UMKM yang di berdayakan	5504	0	1121	1440	128,46%	1121	2561	46,53%

2.17	07	2	01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi Usaha Mikro	3	0	1	1	100%	1	2	66,67%
2.17	07	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pendampingan Pelaku Usaha	80	0	0	0	0%	20	20	25,00%
2.17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha	700	0	140	140	100%	140	280	40,00%
2.17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan	2400	0	480	660	138%	480	1140	47,50%
						Pelatihan Wirausaha baru	1200	0	240	180	75%	240	420	35,00%
						Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro	15	0	3	3	100%	3	6	40,00%
2.17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengakses Permodalan	640	0	160	160	100%	120	280	43,75%
						Pendampingan Pembentukan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik Klinik K-UMKM	13	0	1	1	100%	2	3	23,08%
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi K-UMKM	5	0	1	0	0%	1	1	20,00%
2.17	08				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omset UMKM</b>	<b>1,4%</b>	0,00%	0,30%	0,70%	233%	0,60%	0,60%	42,26%
2.17	08	2	01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	1700	0	420	363	86%	320	683	40,18%
2.17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi akases Pemasaran	600	0	120	143	119%	120	263	43,83%
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Kemasan, dan bantuan sarana prasarana	1100	0	300	220	73%	200	420	38,18%
						Jumlah Event yang diikuti	17	0	1	1	100%	4	5	29,41%

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan 8 Program dengan capaian kinerja Organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 Kegiatan 21 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan rutin Perkantoran pada setia Perangkat Daerah, dengan rata-rata capaiannya Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar **71,92 %**

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ada 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yang berisikan kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, capaiannya rata-rata **100%**

3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan, yang berisikan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten / kota dengan capainnya **99%**

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

Program Peneilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi ada 1 Kegiatan, 2 sub kegiatan yang berisikan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan rata-rata capaiannya **100%**

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan yang berisikan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota untuk peningkatan

pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dengan rata-rata pencapaiannya Program **100%**

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi ada 1 Kegiatan, 1 sub kegiatan dengan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, sandarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota, dengan rata-rata pencapaiannya **100%**

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) ada 1 Kegiatan dan 5 sub Kegiatan, Adapun Keegiatannya pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, dengan rata-rata pencapaiannya **65%**

8. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan Pengembangan UMKM dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yang kegiatannya fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Design dan Teknologi, dengan tingkat capaiannya **100 %**

Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	8,87%	10,00%	13,00%	Naiknya persentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,01%	12,24%	12,59%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	77	68	70	77	
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,00%	82,00%	82,00%	82,49%	82,00%	82,00%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	18,96%	19,46%	21,40%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	18,52%	7,41%	11,11%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkategori Sehat dan Cukup Sehat
7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	66,67%	53,33%	60,74%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya Aset dan Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	2,14%	1,95%	2,92%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
10	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,94%	42,23%	0,44%	0,94%	
11	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	3,01%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
12	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	0,70%	0,57%	0,85%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP.
- b. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi.
- c. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM.
- d. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM.
- e. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku).
- f. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi.
- g. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan.
- h. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga.
- i. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- j. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi.
- k. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM.
- l. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- m. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Paparan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C 31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(9)	(10)	(8)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	100%	11.761.092.392	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskop-UKM	73.00	13.269.850.727	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Diskop-UKM	4 Dokumen	290.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Diskop-UKM	6 Dokumen	515.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	325.000.000	Pagu Bertambah Peny. Dok Renstra
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	190.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	190.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Dokumen	9.087.184.077	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Diskop-UKM	2 Dokumen	8.954.010.135	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	76 Orang/bulan	8.982.743.077	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	75 Orang/bulan	8.849.569.135	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	93.926.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	93.926.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM	106 Paket	110.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>555.114.000</b>	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>730.114.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	70.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	70.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	200.000.000	Pagu Bertambah Jasa Pengelola Web dan Sosial Media DiskopUKM
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>164.299.863</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>787.000.000</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	32 unit	164.299.863	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	30 unit	787.000.000	Pagu Bertambah pengadaan Sarana Prasarana yang kurang pada DiskopUKM
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>914.696.592</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.154.696.592</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	1 Laporan	2.398.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	1 Laporan	2.398.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	152.859.432	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	392.859.432	Pagu Bertambah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>495.871.860</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>985.104.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	25 unit	180.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	27 unit	794.900.000	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas dan Pengadaan Mobil Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	20 unit	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	20 unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	3 Unit	285.171.860	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	1 Unit	160.204.000	
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>19,46%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>21,40%</b>	<b>575.000.000</b>	
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>67,89%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>75,88%</b>	<b>575.000.000</b>	

<p>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.</p>	<p>195 Unit Usaha</p>	<p>175.000.000</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.</p>	<p>195 Unit Usaha</p>	<p>300.000.000</p>	<p>Fasilitasi Pembentukan/Pendampingan Koperasi ASN</p>
<p>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja</p>	<p>Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.</p>	<p>305 Unit Usaha</p>	<p>275.000.000</p>	<p>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja</p>	<p>Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.</p>	<p>305 Unit Usaha</p>	<p>275.000.000</p>	

<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>7,41%</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>11,11%</b>	<b>470.000.000</b>	
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>150 Unit Usaha</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>160 Unit Usaha</b>	<b>470.000.000</b>	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	120.000.000	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	120.000.000	

Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	90.000.000	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	350.000.000	Penghargaan/Pemeringkatan Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Nasional
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian</b>	<b>Kec. Samboja Kec. Loa Kulu Kec. Sebulu Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian</b>	<b>Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000.000</b>	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Loa Kulu Kec. Sebulu Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong	90 Koperasi	200.000.000	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Sebulu Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	90 Koperasi	300.000.000	

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Loa Kulu Kec. Sebulu Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong	180 orang	200.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Sebulu Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	180 orang	300.000.000	
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,</b>	<b>53,3%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,</b>	<b>60,7%</b>	<b>100.000.000</b>	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	<b>Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Muara Muntai,	10 Unit Usaha	100.000.000	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Muara Muntai,	10 Unit Usaha	100.000.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	1,95%	585.000.000	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	2,29%	805.000.000	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	40 Orang	585.000.000	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	50 Orang	805.000.000	

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu, Anggana, Muara Jawa	50 Orang	585.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	50 Orang	805.000.000	Program Digitalisasi Koperasi
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UMKM yang telah difasilitasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>Persentase UMKM yang telah difasilitasi</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.705.000.000</b>	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	1.121 UMKM	2.330.000.000	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	1.211 UMKM	2.705.000.000	

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	121 Unit Usaha	200.000.000	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	50.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	50.000.000	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kec. Tabang Kec. Samboja Kec. Muara Badak Kec. Sebulu Kec. Muara Wis	140 Unit Usaha	500.000.000	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kec. Tabang Kec. Samboja Kec. Muara Badak Kec. Sebulu Kec. Muara Wis Kec. Sanga-Sanga Kec. Tenggarong Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kota Samarinda	140 Unit Usaha	500.000.000	

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kec. TenggarongKec. Muara KamanKec. Kembang JanggutKec. Muara MuntaiKec. Loa KuluKec. Marang KayuKec. Anggana	720 Unit Usaha	1.105.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kec. TenggarongKec. Muara KamanKec. Kembang JanggutKec. Muara MuntaiKec. Loa KuluKec. Marang KayuKec. AngganaKec. Sanga-SangaKec. Muara JawaKec. Samboja	720 Unit Usaha	1.105.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Kota Bangun, Kec. Loa Kulu, Kec. Loa Janan	120 Orang	475.000.000	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kec. Anggana Kec. Kembang Janggut Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	210 Orang	850.000.000	Pembentukan dan pemberdayaan Kinik K-UKM di Kecamatan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0,60%</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0,90%</b>	<b>2.190.000.000</b>	
<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.190.000.000</b>	

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.190.000.000	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.190.000.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>17.826.092.392</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>20.414.850.727</b>

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan Program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terdapat perbedaan rincian dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, perbedaan tersebut pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian Output serta jumlah target kegiatan;

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun ini Pembahasan dilakukan terlebih dahulu pengentrian usulan pada SIPD-RI sebagai bahan Pembahasan yang kemudian Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan Kesepakatan hasil Musrenbang.

Pada Pembahasan di Forum OPD ada beberapa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UKM, usulan dari pemangku kepentingan tersaji dalam Tabe berikut ini.

Tabel 2.4 (TC 3.2)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Muara Badak, Muara Badak Ilir	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang	Murenbang Kecamatan
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Muara Jawa, Dondang		25 Orang	Murenbang Kecamatan
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>				

1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Sanga Sanga , Sanga-Sanga Muara	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Muara Muntai , Muara Muntai Ilir		10 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Loa Kulu , Jembayan Dalam		15 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
4	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Samboja , Samboja Kuala		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Muara Badak , Muara Badak Ilir		20 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
6	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Tenggarong , Bukit Biru		10 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
7	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sanga Sanga , Pendingin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sanga Sanga , Sanga-Sanga Dalam		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sanga Sanga , Sanga-Sanga Muara		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
10	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tenggarong , Panji		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
11	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Muara Jawa , Dondang		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
12	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Marang Kayu , Santan Tengah		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan
13	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Samboja , Samboja Kuala		40 Unit Usaha	Murenbang Kecamatan

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah membawa perubahan sistem Pemerintahan Indonesia yang sentralistik ke arah desentralistik.

Dan bila dikaitkan dengan Urusan di Bidang Koperasi dan UKM maka Pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UKM :

Kebijakan Nasional Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat, mandiri, dan maju dengan Fokus Kontribusi PDB sector Koperasi, Mewujudkan Koperasi Model Baru dan Modern, Pertumbuhan Stat-Up berbasis Koperasi;
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Focus, Kontribusi PDB di sector UMKM, Nilai Ekspor UMKM, Nilai Investrasi UMKM, UKM Naik Kelas, Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM, Rasio Kewirausahaan;

Kebijakan Propinsi Urusan Koperasi dan UKM yang utama sebagai berikut :

Meningkatkan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM, melalui Sumbangan Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB dengan focus menciptakan Koperasi Unggulan, dan UKM Unggulan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD**

#### **3.2.1 Tujuan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dengan Fokus Pembangunan Tahun 2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diuraikan Tujuan dan sasarannya sebagai berikut :

1. Tujuan Pertama, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Tujuan Kedua, Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM dengan Fokus Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro dan koperasi terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi Produksi, Informasi, dan pemasaran;

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 (lima) tahun.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakn secara operasional dengan memperhatikan, ketersediaan sumber daya organisasi.

#### **3.2.2 Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut

1. Sasaran Pertama, *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM;*
2. Sasaran Kedua, *Mempertahankan Jumlah Koperasi Aktif, dengan indicator Persentase Koperasi Aktif;*
3. Sasaran Ketiga, *Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha, dengan Indikator Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha;*

4. *Sasaran Keempat, Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi, Indikatornya Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi*

Tabel 3. 1

## Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	INDIKATOR				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Persentase	67.76	71,94%	70%	73%	77%	80%
2	Meningkatnya Produktifitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persentase	4%	7%	10%	13%	16%	19%
			Persentase Koperasi yang Aktif	Persentase	82%	82%	82%	82%	82%	82%
			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	12%	12,57%	12,75%	12,93%	13,11%	13,28%

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “Memperkuat Landasan Bagi Percepatan (Akselerasi) dan Pembaharuan (Transformasi) Pembangunan Berbasis Potensi Kewilayahan dan Komoditi Unggulan Daerah;
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah terpilih :



Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini Dinas Koperasi memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**Tabel 4.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2024 DAN TAHUN MAJU 2025**

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>73.00</b>	<b>13.269.850.727</b>			<b>77.00</b>	<b>11.686.092.392</b>
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Renanam Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>515.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>290.000.000</b>
<b>2.17.01.2.01.01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskop-UKM	3 Dokumen	325.000.000	Apbd	Pagu Bertambah Peny. Dok Renstra	2 Dokumen	100.000.000
<b>2.17.01.2.01.06</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskop-UKM	3 Dokumen	190.000.000	Apbd		3 Dokumen	190.000.000
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>8.954.010.135</b>	<b>Apbd</b>			<b>9.087.184.077</b>
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskop-UKM	75 Orang/bulan	8.849.569.135	Apbd		75 Orang/bulan	8.982.743.077

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	104.441.000	Apbd		1 Laporan	104.441.000
2.17.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>93.926.000</b>
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	93.926.000	Apbd		1 Laporan	93.926.000
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>100.000.000</b>
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskop-UKM			Apbd			
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskop-UKM	30 Orang	50.000.000	Apbd		30 Orang	50.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskop-UKM					30 Orang	50.000.000
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>730.114.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>555.114.000</b>
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	10.000.000	Apbd		1 Paket	10.000.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	70.000.000	Apbd		1 Paket	70.000.000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Paket	50.000.000	Apbd		1 Paket	50.000.000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Dokumen	25.000.000	Apbd		1 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskop-UKM	1 Laporan	250.064.000	Apbd		1 Laporan	250.064.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	75.050.000	Apbd		5 Dokumen	75.050.000
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Diskop-UKM	1 Dokumen	200.000.000	Apbd	Pagu Bertambah Jasa Pengelola Web dan Sosial Media DiskopUKM	1 Dokumen	25.000.000
2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>787.000.000</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>149.299.863</b>
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskop-UKM	30 unit	787.000.000	Apbd	Pagu Bertambah pengadaan Sarana Prasarana yang kurang pada DiskopUKM	30 unit	149.299.863
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>1.154.696.592</b>	Apbd		<b>100%</b>	<b>914.696.592</b>
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskop-UKM	1 Laporan	2.398.000	Apbd		1 Laporan	2.398.000
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	392.859.432	Apbd	Pagu Bertambah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	152.859.432

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskop-UKM	1 Laporan	759.439.160	Apbd		1 Laporan	759.439.160
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Diskop-UKM</b>	<b>100%</b>	<b>985.104.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>100%</b>	<b>495.871.860</b>
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Diskop-UKM	27 unit	794.900.000	Apbd	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas dan Pengadaan Mobil Operasional	25 unit	180.700.000
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Diskop-UKM	20 unit	30.000.000	Apbd		20 unit	30.000.000
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskop-UKM	1 Unit	160.204.000	Apbd		3 Unit	285.171.860
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>21,40%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>23,35%</b>	<b>450.000.000</b>

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.03.02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Kutai Kartanegara	75,88%	575.000.000	Apbd		75,88%	450.000.000
2.17.03.02.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	195 Unit Usaha	300.000.000	Apbd	Fasilitasi Pembentukan/Pendampingan Koperasi ASN	200 Unit Usaha	175.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.03.02.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	305 Unit Usaha	275.000.000	Apbd		305 Unit Usaha	275.000.000
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi KSP/USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>11,11%</b>	<b>470.000.000</b>	<b>Apbd</b>		<b>14,81%</b>	<b>210.000.000</b>
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Kab. Kutai Kartanegara	160 Unit Usaha	470.000.000	Apbd		170 Unit Usaha	210.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	120.000.000	Apbd		85 Unit Usaha	120.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Muara Muntai, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Wis, Muara Kaman, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang, Sebulu, Loa Kulu, Marangkayu, Loa Janan.	80 Unit Usaha	350.000.000	Apbd	Penghargaan/Pemeringkatan Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Nasional	85 Unit Usaha	90.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengrus dan Pengawas yang memiliki sertifikat petihan perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	100,00%	300.000.000			100,00%	300.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Sebulu Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	90 Koperasi	300.000.000	Apbd		90 Koperasi	300.000.000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kec. Samboja Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Tenggarong Kec. Sebulu Kec. Muara Jawa Kec. Muara Badak	180 orang	300.000.000	Apbd		180 orang	300.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,	60,7%	100.000.000	Apbd		68,1%	100.000.000
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara JawaSanga-sanga, Muara Muntai,	100%	100.000.000	Apbd		100%	100.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Loa Janan , Anggana , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Samboja , Muara Jawa, Sanga-sanga, Muara Muntai,	10 Unit Usaha	100.000.000	Apbd		10 Unit Usaha	100.000.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	2,29%	805.000.000			3,89%	690.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	50 Orang	805.000.000			55 Orang	690.000.000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Muara Muntai , Anggana , Muara Badak , Tenggarong , Sebulu , Kota Bangun , Kenohan , Kembang Janggut , Muara Kaman , Tabang , Samboja , Sanga Sanga , Muara Wis, Loa Kulu, Tenggarong Seberang , Marang Kayu	50 Orang	805.000.000	Apbd	Program Digitalisasi Koperasi	55 Orang	690.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	1,99%	2.705.000.000			1,99%	2.405.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di Berdayakan	Kab. Kutai Kartanegara	1.211 UMKM	2.705.000.000	Apbd		1.121 UMKM	2.405.000.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	121 Unit Usaha	200.000.000	Apbd		121 Unit Usaha	200.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit Usaha	50.000.000	Apbd		20 Unit Usaha	50.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kec. Tabang Kec. Samboja Kec. Muara Badak Kec. Sebulu Kec. Muara Wis Kec. Sanga-Sanga Kec. Tenggarong Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kota Samarinda	140 Unit Usaha	500.000.000	Apbd		140 Unit Usaha	500.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kec. Tenggarong Kec. Muara Kaman Kec. Kembang Janggut Kec. Muara Muntai Kec. Loa Kulu Kec. Marang Kayu Kec. Anggana Kec. Sanga-Sanga Kec. Muara Jawa Kec. Samboja	720 Unit Usaha	1.105.000.000	Apbd		720 Unit Usaha	1.105.000.000

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kec. Tenggarong, Kec. Sanga-Sanga, Kec. AngganaKec. Kembang JanggutKec. Muara JawaKec. Muara Badak	210 Orang	850.000.000	Apbd	Pembentukan dan pemberdayaan Kinik K-UKM di Kecamatan	120 Orang	550.000.000
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Pertumbuhan Omzet UMKM</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>0,90%</b>	<b>2.190.000.000</b>			<b>1,10%</b>	<b>2.190.000.000</b>
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Usaha Mikro</b>	<b>Kab. Kutai Kartanegara</b>	<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.190.000.000</b>			<b>320 Unit Usaha</b>	<b>2.190.000.000</b>
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kutai Kartanegara	320 Unit Usaha	2.190.000.000	Apbd		320 Unit Usaha	2.190.000.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>20.414.850.727</b>				<b>18.031.092.392</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Fokus / Tema Pembangunan Kutai Kartanegara “penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas; peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing; serta peningkatan nilai tambah potensi Ekonomi terbarukan dan kualitas lingkungan hidup. dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia,

Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih tersebut telah tergambar kedalam program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah;

Akhir kata apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini akan kami lakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kritik dan saran sangat kami harapkan, terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak;

Tenggarong, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas,

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



**Drs. TAJUDDIN**

NIP. 196404051986031036



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

